

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis S2 MAP, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anthony, Govindarajan. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Darma, Jufri dan Ali Fikri, H. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Mediasi*, Vol. 4 No.1 Juni 2012.
- Darmawan, Didit. 2013. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mardiasmo. 2001. *Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Penerbit Andy. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Universitas Tridinanti Palembang. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 2, No. 1.
- Novietta, liza. 2010. Pengaruh partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan eksekutif tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah : STIE Harapan Medan, Vol.2, No.1, maret 2010.
- Pangesti Isa. 2013. Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. *Accounting Analysis Journal AAJ* 1(3) 2013.
- Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. Universitas Muhammadiyah Magelang. SNA XIII.

- Pratamawati, Aldila. 2012. *Pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating (studi empiris DPRD Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2001. Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Ritonga, Irwan. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Roseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik*. UII, Skripsi.
- Santosa, Slamet. 2010. *Lokakarya Membedah LKPJ Kepala Daerah*. Lor In solo: Surakarta.

- Sopannah dan Mardiasmo.2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Widyaningsih aristanti dan Pujirahyu. 2012. Pengaruh pengetahuan anggota legislative daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal media riset akuntansi*, Vol.2.No.1.Februari 2012.
- Zainuddin et al. 2002. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.